



**PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM,
PERTAHANAN, DAN KEAMANAN SERTA
REFORMASI BIROKRASI**



PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN, SERTA REFORMASI BIROKRASI

Kedudukan pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta reformasi birokrasi merupakan prasyarat untuk mendukung pembangunan nasional secara keseluruhan. Prasyarat tersebut meliputi pembangunan politik dan demokrasi, kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Politik dan Demokrasi. Pada tahun 2017, pemerintah telah berhasil mendukung penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mencakup 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Jika dilihat tingkat partisipasi pemilih, terjadi peningkatan dari 69,2% (2015) menjadi 74,5% (2017). Selain itu, telah pula dilakukan penanganan konflik sosial melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), peningkatan kapasitas intelijen aparaturnya pusat dan daerah, serta proses konsolidasi demokrasi dalam hal penanggulangan terorisme. Dalam bidang politik luar negeri, diplomasi Indonesia telah berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional, menjaga integritas wilayah Indonesia, serta memberikan kontribusi bagi stabilitas dan perdamaian dunia.

Kepastian dan Penegakan Hukum. Upaya mewujudkan kepastian dan penegakan hukum telah menunjukkan berbagai kemajuan, antara lain: (1) Penurunan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH); (2) Perbaikan pelayanan yang memberikan kemudahan berusaha, seperti kemudahan mendapatkan kredit dan perbaikan waktu pelayanan menjadi lebih singkat; (3) Peningkatan kuantitas maupun kualitas aparaturnya penegak hukum; (4) Penyelamatan kerugian negara dari tindak pidana korupsi; (5) Pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dan Unit Pemberantasan Pungli (UPP); (6) Pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi kepada masyarakat miskin; (7) Peningkatan jumlah kebijakan yang kondusif terkait perlindungan perempuan dan anak; serta (8) Reformasi sistem hukum perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*).

Keamanan dan Ketertiban. Pelaksanaan pembangunan keamanan dan ketertiban telah menunjukkan capaian antara lain pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*Minimum Essential Force/MEF*) Tahap II, penguatan perbatasan, pengembangan industri pertahanan, deteksi dini dan penanganan potensi gangguan keamanan dalam negeri, penguatan keamanan laut, serta pemberantasan narkoba. Berdasarkan data tahun 2016, 43 jaringan narkoba nasional dan 44 jaringan narkoba internasional berhasil dibongkar. Selain itu di tahun yang sama, dilakukan penyitaan aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kejahatan narkoba Rp261 miliar.

Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi. Peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional ditunjukkan oleh: (1) Capaian indeks RB dengan skor B ke atas untuk K/L (92,68%), provinsi (38,24%), dan kabupaten/kota (37,29%); (2) Penataan Lembaga Non Struktural (LNS); (3) Penguatan pelaksanaan manajemen ASN; (4) Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (5) Penerapan standar pelayanan dengan tingkat kepatuhan K/L/Pemda yang semakin membaik; serta (6) Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang ditunjukkan dengan peningkatan perolehan Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai akuntabilitas kinerja "Baik" pada instansi pemerintah, penerapan *e-procurement* untuk memastikan proses pengadaan barang/jasa berjalan secara transparan yang menghasilkan efisiensi belanja pengadaan.

POLITIK DAN DEMOKRASI

PILKADA SERENTAK 2017

Tingkat Partisipasi Pemilih

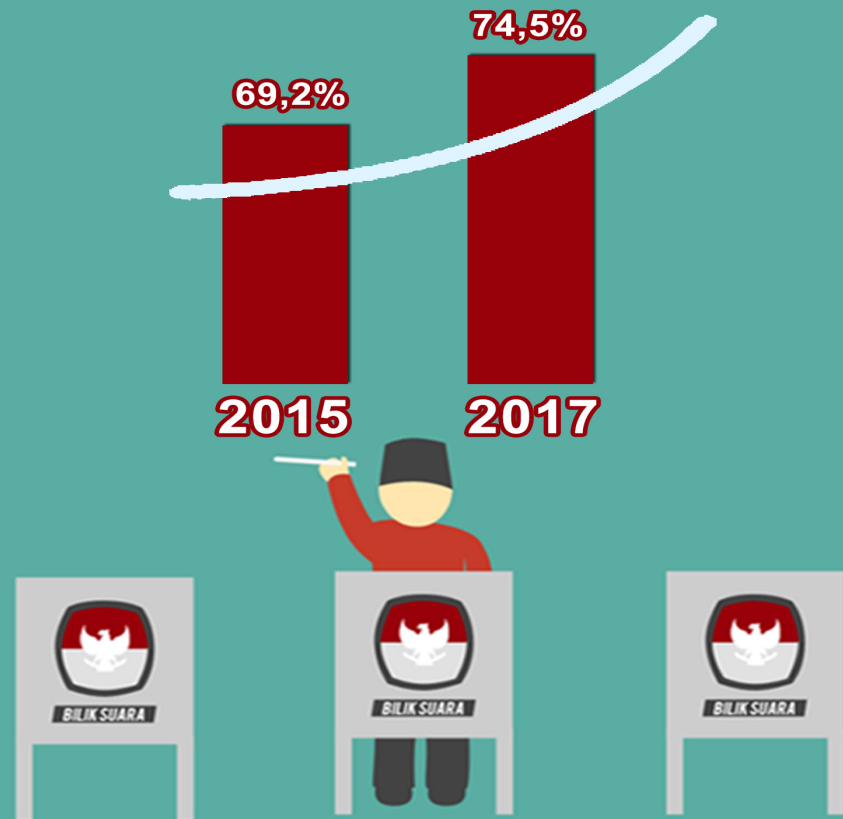


18 Kota

An icon of a person's head in a circle is followed by the text '18 Kota'.

76 Kabupaten

An icon of a person's head in a circle is followed by the text '76 Kabupaten'.



POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA



- Perjanjian Garis Batas Laut Wilayah RI-Singapura **diratifikasi**
- Draft MoU Survey and Demarcation ke-20 Indonesia dan Malaysia untuk batas darat Kalimantan Utara dan Sabah **disepakati**
- Tahap akhir dua *unresolved segment* batas darat Indonesia-Timor Leste **diselesaikan**



1.140 peserta dari
57 negara
berkembang
terlibat dalam 46
program
KSST Indonesia

- **"Diplomasi maraton"** membantu penyelesaian konflik **Rakhine State Myanmar**
- Pengiriman **bantuan kemanusiaan** berupa logistik dan pembangunan dua sekolah, bantuan untuk rumah sakit di Mrauk-U, Myanmar.



- **14.301** kasus WNI di luar negeri **diselesaikan**
- **21.181** penanganan kasus dicatatkan *by name* dalam sistem e-Perlindungan

Indonesia menjadi salah satu **penyumbang terbesar** Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dengan peringkat pengirim pasukan **ke-12** dari 125 negara.

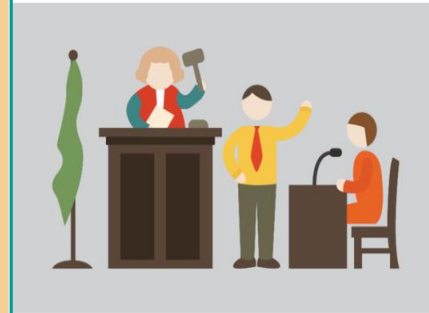




KEPASTIAN DAN PENEGAKAN HUKUM



870 kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Saber Pungli dengan jumlah tersangka sebanyak 1.768 orang



Bantuan Hukum untuk penanganan litigasi 8.005 kasus dan nonlitigasi 1.188 kegiatan



Fasilitas pelayanan pesan nama Perseroan Terbatas (PT) hanya 1 menit dan pendaftaran fidusia hanya 7 menit



Reformasi sistem hukum perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)



Peningkatan jumlah kebijakan yang kondusif terhadap perempuan dari 276 kebijakan (2014) menjadi 349 kebijakan (2016)



Penurunan jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) dari 3.183 orang menjadi 2.462 orang



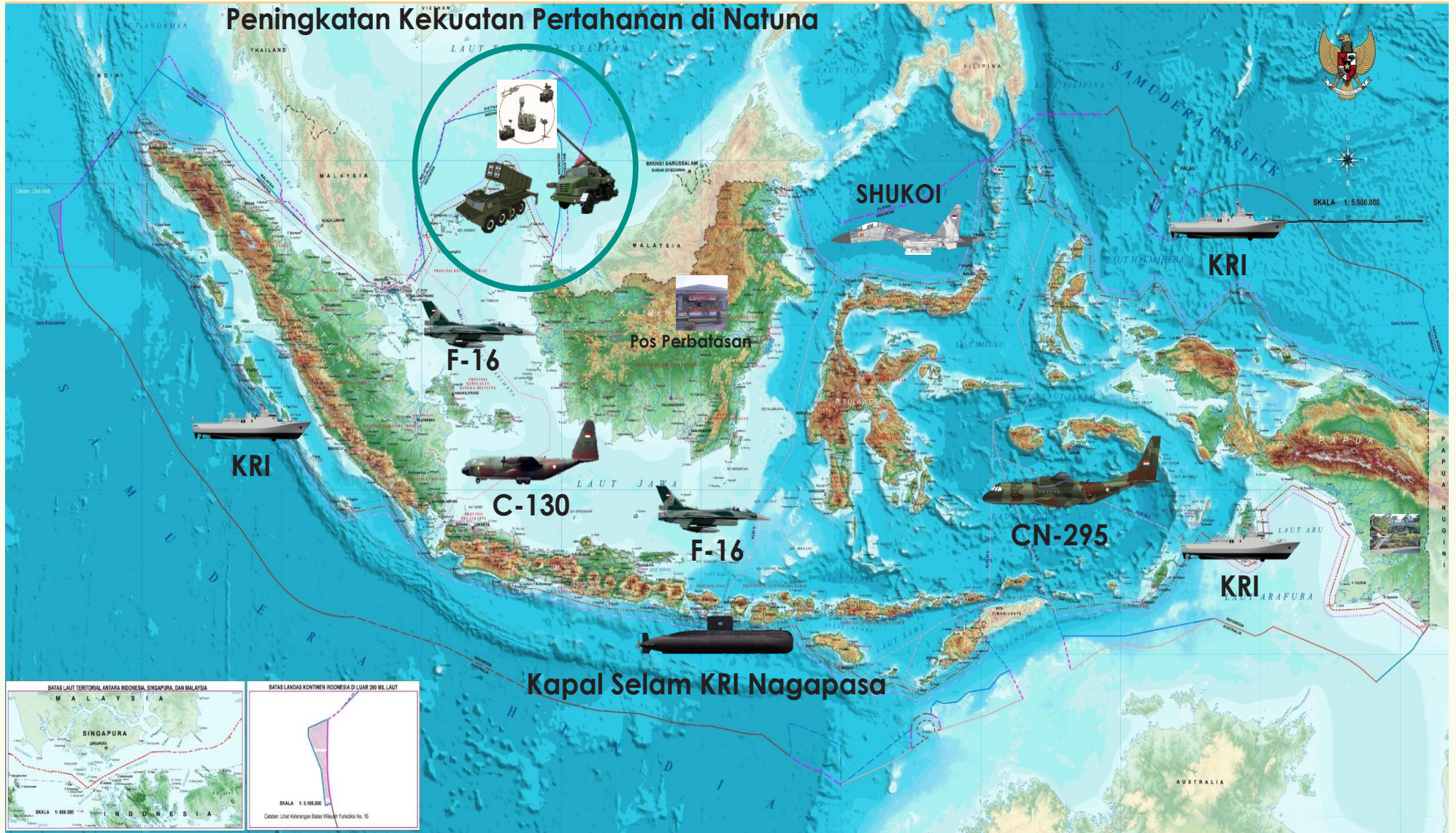
Penyelamatan kerugian negara dari tindak pidana korupsi Rp 3,55 triliun dan USD 263.929,12 sepanjang 2016 dan 2017



Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari 87 hakim pada tahun 2016 turun menjadi 32 hakim di tahun 2017

PEMBANGUNAN PERTAHANAN

Peningkatan Kekuatan Pertahanan di Natuna



PEMBANGUNAN KEAMANAN

Deteksi Dini Penanggulangan Terorisme

- Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara
- Penanganan 15 Kasus Penyebaran Paham Radikal Melalui internet
- Penegakkan Hukum 120 Situs Radikal yang terafiliasi ISIS
- Keberhasilan Operasi Tinombala Teroris Santoso

Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban

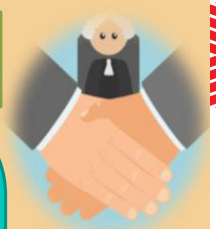
- Pengamanan Gejolak Aksi Masa
- Pengamanan Kegiatan Skala Internasional
- Pengamanan Pilkada Serentak 2017 di 101 wilayah
- Pengamanan Hari Besar Keagamaan
- Keberhasilan Satgas Pangan
- Pengadaan Alamsus Polri Teknologi Tinggi

Pengungkapan Kasus Illegal Fishing

- 2015 → 371 Kasus
- 2016 → 460 Kasus
- Juli 2017 → 212 Kasus

Jumlah Kapal yang Melanggar Hukum

- 2015 → 2100 Kapal
- 2016 → 3627 Kapal
- Juni 2017 → 1554 Kapal



PENANGANAN PERMASALAHAN NARKOBA

#IndonesiaDaruratNarkoba

PREVENTIF

Prevalensi Penyalahguna



Angka prevalensi penyalahguna narkoba kelompok pelajar dan mahasiswa sebesar 1,9% di tahun 2016

Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin

Wanita 54,2% Pria 45,8%

Jumlah Pelajar dan Mahasiswa yang Terpapar Narkoba

1,59 juta pelajar & mahasiswa coba pakai
218 ribu pelajar & mahasiswa teratur pakai
54 ribu pelajar & mahasiswa pecandu



Penyalahguna Narkotika di tiap jenjang pendidikan

SMP 24,4% SMA 54,9% Perguruan Tinggi 20,7%



Masuknya 66 narkoba jenis baru ke Indonesia, 43 jenis sudah digolongkan sebagai narkotika dalam Permenkes No. 2 Tahun 2017

Berdasarkan data tahun 2016

43 Jaringan narkoba nasional & 44 jaringan narkoba internasional berhasil dibongkar

Penyitaan aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kejahatan narkotika Rp 261 Miliar



40% penghuni lapas terkait kasus narkotika (81.846 kasus)



KURATIF

Berhasil Disita dan Dimusnahkan

Ganja

2.405.536 batang ganja
85 ton ganja kering
645 ha ladang ganja

Ekstasi

3.117.148 butir
20,40 kg



Shabu

5,91 ton

Heroin

3,20 kg



Hashish

3,10 kg

Kokain

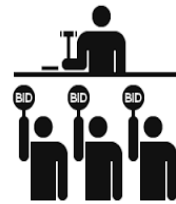
110gr

REFORMASI BIROKRASI



Indeks RB nilai "**Baik**" pada:

- **92,68 %** K/L
- **38,24 %** provinsi
- **37,29 %** kab/kota



352 instansi pemerintah (44 K/L, 22 provinsi, 286 kab/kota) mengisi jabatan sesuai dengan **standar kompetensi**

11 LNS dibubarkan
2 LNS diintegrasikan
1 LNS disempurnakan tusunya

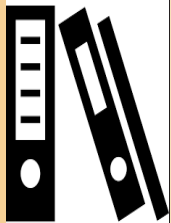
LNS: Lembaga Non Struktural



penerapan **e-procurement** telah menghasilkan efisiensi sebesar **Rp 28,3 triliun**



74 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga mendapatkan opini **WTP**



103 K/L/Pemda menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) berbasis TIK

44 % Kementerian, **66,67 %** Lembaga, **39,39 %** Provinsi menerapkan **standar pelayanan**

